

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah menjadi bahan pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD.

Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan serta indikator kinerja. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- c) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- d) Penetapan Renja Perangkat Daerah

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah dan keseluruhannya disusun berdasarkan prinsip satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pada Rancangan awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dimana Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, sementara Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD, sehingga Renja Perangkat Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan selaras dengan Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5)

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5)
17. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 ttg Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045
19. Peraturan Walikota 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tahapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Kota Probolinggo
6. Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 2 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Umum
7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026
9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2024 tentang IKU Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
10. Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Renja Awal Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan dan untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah khususnya di Kota Probolinggo.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2026 adalah sebagai :

- a. Menjabarkan arah RPD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 – 2026 kedalam rencana instansional;
- b. Menjabarkan kebijakan Renstra Dinas Perhubungan ke dalam rencana tahunan pada tahun anggaran 2026
- c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

- d. Menyediakan Dokumen Rencana Kerja Atau Rencana Kinerja Tahunan
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan
- f. Untuk menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencana, pelaksana dan pengelola perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai pada evaluasi kinerja
- g. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi

#### **1.4. Sistematika**

Sistematika penulisan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
- 2.2 Analisis Kinerja Dinas Perhubungan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO**

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO**

##### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA**

Renja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) Program dan 16 (Enam belas) Kegiatan. Dari jumlah Program dan Kegiatan tersebut yang terakomodir pada penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah 3 (Tiga) Program dan 16 (Enam belas) Kegiatan, selanjutnya pada penyusunan RKA Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 (Tiga) Program dan 16 (Enam belas) Kegiatan, dan pada penyusunan DPA Tahun Anggaran 2024 terealisasi menjadi 3 (Tiga) Program dan 16 (Enam belas) Kegiatan. Kesesuaian Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan sama pada penyusunan KUA-PPAS , pada saat penyusunan RKA sampai Penyusunan DPA Tahun Anggaran 2024. Dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo pada Tahun 2024 sebesar Rp. 28.029.846.738,00

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2023 s.d 2025)	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) (2023 s.d 2025)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target (2024)	Realisasi (2024)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2025	Tingkat Realisasi (%)(2025)
1	2	3	4	5	6	7	8 = ((7/6)x100)	9	10=(kolom 9)	11=(kolom 10/9 x 100)	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
	Bidang Urusan Perhubungan										
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>90</b>	<b>81.45</b>	<b>98</b>	<b>93</b>	<b>187</b>	84	<b>23</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	<b>86</b>	<b>98.75</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>189</b>	75	<b>20</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	<b>6</b>	6	6	12	6	<b>2</b>		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	<b>4</b>	7	7	11	7	<b>0</b>		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>199</b>	100	<b>25</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528	<b>528</b>	531	528	1.056	588	<b>147</b>		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan yang terverifikasi	100	<b>100</b>	12	12	112	100	<b>3</b>		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9	<b>8</b>	7	7	15	7	<b>0</b>		

				<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai ketentuan</b>			<b>100</b>	<b>91</b>	<b>91</b>		100	<b>0</b>	
				Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2	2	2		2	<b>0</b>	
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>48</b>	<b>88</b>		100	<b>0</b>	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	50	<b>50</b>	6	6	56	Tidak mencapai target dikarenakan realisasi dalam penyerapan anggaran disesuaikan kebutuhan	100	<b>0</b>	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>99.17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>199</b>		100	<b>25</b>	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100	<b>97.47</b>	5	5	102		100	<b>1</b>	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	100	<b>100</b>	6	6	106		100	<b>1</b>	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase realisasi barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100	<b>98</b>	2	4	102		100	<b>1</b>	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang terpenuhi	36	<b>36</b>	2	4	40		2	<b>0</b>	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan tamu yang terfasilitasi	100	<b>99.73</b>	12	12	112		12	<b>3</b>	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	<b>99.81</b>	12	12	112		12	<b>3</b>	
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	0			100	<b>95</b>	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2	<b>2</b>	-	0			100	<b>11</b>	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>99.125</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>196</b>		100	<b>24</b>	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	100	<b>98.46</b>	12	12	110		100	<b>3</b>	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100	<b>99.87</b>	12	12	112		100	<b>3</b>	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpenuhi	100	<b>99</b>	5	5	104		100	<b>0</b>	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	100	<b>99.17</b>	12	12	111		100	<b>3</b>	

				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>99.7</b>	<b>100</b>	<b>66</b>	<b>166</b>		100	<b>20</b>	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	2		1	0	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	31	34	32	63		34	4	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	17	35	33	50		35	0	
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	4	4	4	8		8	2	
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>										
				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan</b>	<b>90</b>	<b>111.16</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>202</b>		<b>90</b>	<b>0</b>	
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun	3	3	1	1	4		1	0	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Perlengkapan jalan Elektrikal	53	79	47	54	133		69	0	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara							2	0	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah pemenuhan Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan Elektrikal	1500	1268	1900	1499	2767		1930	0	
				<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase Kendaraan yang menggunakan Fasilitas Parkir Angkutan Barang</b>	<b>90</b>	<b>135.27</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>223,27</b>		<b>90</b>	<b>15</b>	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	12	12	24		12	3	
				<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Presentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang laik jalan</b>	<b>92%</b>	<b>55.76</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>151</b>		<b>94</b>	<b>5</b>	
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	8250	8250	8500	10826	19076		9000	0	
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji elektronik yang tersedia	2500	0	5000	8000	8000		4400	0	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian dalam kondisi baik	9	9	9	13	22		6	0	
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang lulus uji/laikjalan	8892	4600	12	12	4612		1	3	

				<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana jaringan jalan di wilayah kota</b>	<b>77</b>	<b>110.42</b>	<b>100</b>	100	211		75	<b>19</b>	
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Presentase Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRL	70	<b>99.05</b>	12	35	134,05		6	3	
				Pembanguna Zona Selamat Sekolah (Zoss)	jumlah terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	-	-	-				6	0	
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	2	<b>2</b>	-				-	0	
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan LLAJ	83	<b>83</b>	6	12	98,79		12	0	
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembahasan Kebijakan LLAJ	8	<b>10</b>	35	8	95,00		6	0	
				<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha yang taat Andalalin</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	100,00		100	<b>10</b>	
				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Andalalin sesuai rekomendasi	10	<b>14</b>	15	15	100,00		20	2	
				<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Angkutan Penumpang umum di Kota Probolinggo</b>	<b>13.17</b>	<b>12.8</b>	<b>80</b>	110	100,00		80	<b>20</b>	
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dan Angkutan Barang	5253	<b>2077</b>	70	15	100,00		12	3	
				<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jaringan trayek perkotaan yang ditetapkan</b>	<b>15.69</b>	<b>14.88</b>	<b>15</b>	15	97,50		1	<b>0</b>	
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	50	<b>0</b>	1	5	97,50		1	0	
				<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek</b>	<b>204</b>	<b>16</b>	<b>85</b>	30	95,87		100	<b>0</b>	

					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	12	204	10	94,90		12	0	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	204	1	100,00		12	0	
					<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>				2	2	100				
					<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pemilik kapal dibawah 7GT yang hadir dalam pembinaan keselamatan pelayaran</b>			75	75	100				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten /kota			1	1	100				

Pada program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target dikarenakan penyerapan anggaran disesuaikan kebutuhan dan sub kegiatan yang sudah memenuhi target serta yang melebihi akan di dijadikan acuan untuk penyerapan pada tahun berikutnya. Untuk Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dikarenakan adanya kurang tepatnya pada perencanaan target kinerja. Capaian program Renja Perangkat Daerah akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan capaian program dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan pemerataan pembangunan Pemerintah membagi urusan pemerintahan dengan 2 (dua) urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Yang didalamnya memuat urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, salah satunya penanganan urusan di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan urusan wajib di bidang perhubungan, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan perhubungan daerah dan juga diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah (PD) terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja dan sasaran pada RENSTRA 2025-2026 adalah untuk mewujudkan visi **“Mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo Yang Inklusif, Berdaya Saing, Dan Berkelanjutan”** dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah.
2. Pembangunan Sumberdaya Manusia Unggul dan Berkarakter.
3. Mewujudkan Pemantapan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Dinamis, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Presentase penyediaan fasilitas keselamatan jalan kota

Hasil analisa kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada para masyarakat pengguna jalan berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan  
Kota Probolinggo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU PD)	Target SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Prosentase Sarana dan Prasarana LLAJ yang tersedia di Kota Probolinggo			70	64	66	67	82.79				
2	Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo			20	45	50	55	0.00				tidak melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan dikarenakan regulasi dari Kepolisian yang menghapus penindakan tilang manual dan Dinas Perhubungan tidak boleh mengadakan Operasi Penertiban secara individual (berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) guna mengurangi unsur pemungutan liar di lapangan
3	Prosentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan			100	57	60	63	67				Pada tahun 2024 banyak kendaraan khususnya angkutan barang yg masih proses penyesuaian dimensi kendaraan terkait penerapan regulasi zero odol dan penerapan UU No 1 tahun 2022 terkait hubungan keuangan pusat dan daerah (penghapusan retribusi. Pkb) sehingga tidak ada denda bagi kendaraan yang tidak melaksanakan uji, serta pengawasan di lapangan yg menurun

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang ada secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Bidang Perhubungan dapat diidentifikasi sbb :

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana LLA yang tersedia di Kota Probolinggo dari segi kuantitas masih terpusat pada Kawasan Tertib Lalu Lintas
2. Tingkat pelanggaran angkutan jalan di Kota Probolinggo cenderung meningkat
3. Kondisi transportasi darat yang memenuhi standar keselamatan semakin menurun karena penegakkan dan penertiban aturan/kebijakan dari Kementerian Perhubungan tentang Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) untuk memenuhi standar keselamatan jalan dan masih banyaknya Angkutan Jalan yang tidak melakukan Uji Berkala di Kota Probolinggo akibat penegakkan kebijakan tersebut

Adapun Isu Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan kendaraan angkutan umum karena rendahnya kualitas dan cakupan sarana transportasi publik.
2. Optimalisasi penyediaan sarana, prasarana kelengkapan jalan guna meningkatkan angka keselamatan berkendara di jalan.
3. Penertiban pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dalam melakukan Uji Berkala dikarenakan masih terdapat Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu Over Dimensi dan Over Load (ODOL).
4. Pemenuhan sarana jaringan Alat Penerangan Jalan (APJ) di wilayah Kota Probolinggo.
5. Peningkatan layanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang didukung ketersediaan sarana prasarana berupa Gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor secara mandiri.
6. Peningkatan pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan untuk Kalangan Rentan Gender (Lansia, Disabilitas, dan anak-anak).

#### **2.4. Rancangan Akhir Perangkat Daerah**

Pada penyusunan Renja Akhir tahun 2026 merupakan landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja Dinas Perhubungan dengan Prioritas pembangunan daerah Kota Probolinggo yaitu Peningkatan Akses dan Pemantapan Kualitas Infrastruktur guna Optimalisasi Pelayanan Kota berdasarkan RPD tahun 2025-2026 dengan tema **Peningkatan kualitas Infrastruktur guna mendukung penguatan Ekonomi inklusif.**

Jika di kaitkan dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan mempunyai sasaran pokok yaitu mengoptimalkan pelayanan pada infrastruktur kota dengan arah kebijakan yaitu Mengoptimalkan perluasan akses dan kualitas infrastruktur guna pemantapan ekonomi dan layanan dasar.

Tabel T-C.31.  
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026  
Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah: Dinas  
Perhubungan

Lembar..... Dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan 2026	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan 2026	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>87</b>	<b>11,610,138,991.00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	<b>87</b>	<b>8,806,993,447.16</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	<b>77</b>	<b>16,905,700.00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%</b>	<b>77</b>	<b>14,728,000.00</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	14,105,900.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	11,930,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	2,799,800.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	2,798,000.00	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>8,977,133,799.00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>6,537,999,608.00</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600	8,691,867,591.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600	6,245,024,156.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	12	281,033,808.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	12	283,575,552.00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7	4,232,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7	9,399,900.00	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai ketentuan</b>	100	16,900,000.00	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai ketentuan</b>	100	10,000,000.00	
	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	16,900,000.00	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	10,000,000.00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan</b>	100	167,000,000.00	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan</b>	100	12,000,000.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	167,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	12,000,000.00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	100	330,908,000.00	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	100	357,382,683.16	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	30,757,600.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	40,416,000.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	27,315,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	36,833,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	30,389,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	37,036,283.16	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	2	3,600,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	2	3,600,000.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu	12	38,800,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu	12	40,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	200,046,400.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	199,497,400.00	

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	236,000,000.00	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	164,000,000.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12	236,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12	164,000,000.00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi</b>	100	1,123,187,892.00	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi</b>	100	1,174,901,056.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	3,475,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	3,472,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	242,230,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	254,290,000.00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	31,375,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	31,375,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	846,107,892.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	885,764,056.00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	100	742,103,600.00	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	100	535,982,100.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44,346,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	40,586,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	414,407,600.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	409,556,100.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	23,350,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	45,840,000.00	

	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	8	260,000,000.00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	8	15,000,000.00
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25,000,000.00
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		<b>Persentase penyediaan fasilitas keselamatan jalan kota</b>	66	32,501,026,806.00	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		<b>Persentase penyediaan fasilitas keselamatan jalan kota</b>	66	17,055,051,037.84
	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan	10	1,054,213,000.00	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan	10	-
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	10	1,054,213,000.00	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	10	-
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan</b>	92	26,305,348,900.00	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan</b>	92	13,543,757,713.84
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun	1	100,000,000.00	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun	1	-
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan jalan di Jalan kabupaten/kota yang tersedia	50	6,860,773,872.00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan jalan di Jalan kabupaten/kota yang tersedia	50	526,253,500.00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	12	310,775,000.00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	12	499,822,500.00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	2530	19,033,800,028.00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	2530	12,517,681,713.84
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>		<b>Persentase Fasilitas Parkir Berizin</b>	95	733,700,000.00	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>		<b>Persentase Fasilitas Parkir Berizin</b>	95	534,100,000.00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	11	733,700,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	11	534,100,000.00	
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>		Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala	60	623,720,000.00	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>		Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala	60	362,262,368.00	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor				56,800,000.00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		81,500,000.00	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	9000	62,975,000.00	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	9000	17,850,000.00	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti lulus Uji pengujian berkala kendaraan bermotor	5840	175,000,000.00	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti lulus Uji pengujian berkala kendaraan bermotor	5840	25,000,000.00	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	9	198,900,000.00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	9	97,000,000.00	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	12	130,045,000.00	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	12	140,912,368.00	
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada Jaringan Jalan Kota dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	77	3,604,972,906.00	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada Jaringan Jalan Kota dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	77	2,540,331,656.00	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	21	2,566,348,656.00	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	21	2,217,565,656.00	

	Jalan Kabupaten/Kota									
	Pembanguna Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4	201,050,000.00	Pembanguna Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4	-		
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	19,740,000.00	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	33,950,000.00		
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	6	4,725,000.00	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	6	21,750,000.00		
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	6	813,109,250.00	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	6	213,231,000.00		
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9	53,835,000.00		
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota yang disetujui	100	39,987,000.00	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota yang disetujui	100	31,799,900.00		
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi	25	39,987,000.00	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi	25	31,799,900.00		
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1</b>	Persentase Angkutan Umum yang tersedia	14.88	46,930,000.00	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Angkutan Umum yang tersedia	14.88	16,575,000.00		

	<b>(Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	6	46,930,000.00	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	6	16,575,000.00	
	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan	11	4,655,000.00	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan	11	4,795,000.00	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	4,655,000.00	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	4,795,000.00	
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Izin Trayek Angkutan Orang lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	14	87,500,000.00	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Izin Trayek Angkutan Orang lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	14	19,412,500.00	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	48,650,000.00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha		Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	6,150,000.00	

	dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Terintegrasi Secara Elektronik					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	6	38,850,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	6	13,262,500.00	
						<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>2,016,900.00</b>	
						Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2,016,900.00	
						<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>				793,018,168.00	
						<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>				<b>793,018,168.00</b>	
						Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota				793,018,168.00	
	Jumlah				44,111,165,797.00					26,655,062,653.00	



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Adapun sasaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat yaitu :

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional.
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/regulatory reform) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk ber-peranserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai.
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, yaitu pengembangan jalur jaringan trayek angkutan jalan, pengembangan fasilitas parkir pada titik tertentu dan wilayah tepi jalan umum dan Pengembangan fasilitas jalur penyembrangan di wilayah sekolah. Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dengan pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

Dinas Perhubungan dan LLAJ Propinsi Jawa Timur dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yaitu: "Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang selamat lancar dan nyaman. Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan kinerja sumber daya manusia perhubungan Jawa Timur.
2. Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu.
3. Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang baik dan ramah lingkungan.
4. Tercapainya peningkatan pelayanan transportasi yang prima.
5. Tercapainya peningkatan akuntabilitas tata kelola Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

Ditinjau dari Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur diatas, setidaknya ada 3 sasaran yang mempunyai keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, yaitu : peningkatan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu, peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang baik dan ramah lingkungan dan peningkatan pelayanan transportasi yang prima. Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yaitu kurangnya sarana pendukung fisik yang menunjang pembangunan sarana prasarana perhubungan dan keterbatasan SDM yang tersedia dalam mendukung pencapaian kinerja PD. Sementara untuk pelayanan Angkutan masih ada hambatan dari faktor eksternal yang sifatnya non teknis karena kendala sosial dan kultural. Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, yaitu :

1. Adanya koordinasi yang cukup baik pada pelaksanaan menghadapi Angkutan lebaran, natal dan tahun baru.
2. Adanya pemeliharaan Rambu atau penggantian Rambu yang sudah rusak/usang.
3. Ter-Inventarisasinya Kendaraan yang wajib uji menurut Jenis Kendaraan.
4. Adanya perubahan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan.
5. Adanya Kesadaran pemilik/sopir angkutan umum yang memiliki wajib uji kendaraan secara berkala melalui Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor secara cermat dan akurat sehingga mengurangi angka kecelakaan dan mengurangi pencemaran udara.
6. Tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan yang mendukung keselamatan berlalu lintas.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut:

#### **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan lingkungan hidup”**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan “**Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**”, maka ditetapkan sasaran

**Meningkatnya Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan;**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja	
				2025	2026
	Meningkatkan Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan dalam Bidang Perhubungan	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Tersedia di Kota Probolinggo	95%	96%
			Rasio Kejadian Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api	0%	0%
		Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat yang Memenuhi Standar Keselamatan	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	70%	72%
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dishub	90%	92%

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah- masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkrit dan didalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda- beda akan tetapi menuju pada suatu tujuan yang sama. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2026 maka program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
		Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten/Kota
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam

**Tabel T-C.33**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026  
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Probolinggo  
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan**

Lembar..... Dari.....

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Tahun 2026	tahun 2026	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6.00	7	8	9	10
2	15	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	Kota Probolinggo	87	11,610,138,991.00	DAU		89	12,190,645,940.55
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%		77	16,905,700.00			79	17,750,985.00
2	15	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	14,105,900.00			6	14,811,195.00
2	15	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7	2,799,800.00			7	2,939,790.00
2	15	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi keuangan sesuai ketentuan</b>		100	8,977,133,799.00			100	9,425,990,488.95
2	15	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		600	8,691,867,591.00			600	9,126,460,970.55

2	15	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		12	281,033,808.00			12	295,085,498.40
2	15	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		7	4,232,400.00			7	4,444,020.00
2	15	01	2	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai ketentuan</b>		100	16,900,000.00			100	17,745,000.00
2	15	01	2	03	0016	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	16,900,000.00			2	17,745,000.00
2	15	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan</b>		100	167,000,000.00			100	175,350,000.00
2	15	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		6	167,000,000.00			6	175,350,000.00
2	15	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>		100	330,908,000.00			100	347,453,400.00
2	15	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	30,757,600.00			5	32,295,480.00
2	15	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		6	27,315,000.00			6	28,680,750.00
2	15	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2	30,389,000.00			2	31,908,450.00

2	15	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2	3,600,000.00		2	3,780,000.00
2	15	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu	12	38,800,000.00		12	40,740,000.00
2	15	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	200,046,400.00		12	210,048,720.00
2	15	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	236,000,000.00		100	247,800,000.00
2	15	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12	236,000,000.00		12	247,800,000.00
2	15	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi</b>	100	1,123,187,892.00		100	1,179,347,286.60
2	15	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	3,475,000.00		12	3,648,750.00
2	15	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	242,230,000.00		12	254,341,500.00
2	15	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	31,375,000.00		4	32,943,750.00
2	15	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	846,107,892.00		12	888,413,286.60
2	15	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	100	742,103,600.00		100	779,208,780.00

2	15	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	44,346,000.00		1	46,563,300.00
2	15	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		34	414,407,600.00		34	435,127,980.00
2	15	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		35	23,350,000.00		35	24,517,500.00
2	15	01	2	09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		8	260,000,000.00		8	273,000,000.00
													-
2	15	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase penyediaan fasilitas keselamatan jalan kota</b>		66	32,501,026,806.00		68	34,126,078,146.30
2	15	02	2	01		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan		10	1,054,213,000.00		10	1,106,923,650.00
2	15	02	2	01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		10	1,054,213,000.00		10	1,106,923,650.00
2	15	02	2	02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan</b>		92	26,305,348,900.00		92	27,620,616,345.00
2	15	02	2	02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun		1	100,000,000.00		1	105,000,000.00
2	15	02	2	02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan di Jalan kabupaten/kota yang tersedia		50	6,860,773,872.00		50	7,203,812,565.60
2	15	02	2	02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		12	310,775,000.00		3	326,313,750.00
2	15	02	2	02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		2530	19,033,800,028.00		2530	19,985,490,029.40

2	15	02	2	04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Persentase Fasilitas Parkir Berizin	95	733,700,000.00			95	770,385,000.00
2	15	02	2	04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	11	733,700,000.00			12	770,385,000.00
2	15	02	2	05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala	60	623,720,000.00			60	654,906,000.00
2	15	02	2	05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		56,800,000.00				59,640,000.00
2	15	02	2	05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	9000	62,975,000.00			9000	66,123,750.00
2	15	02	2	05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti lulus Uji pengujian berkala kendaraan bermotor	5840	175,000,000.00			5840	183,750,000.00
2	15	02	2	05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	9	198,900,000.00			9	208,845,000.00
2	15	02	2	05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	12	130,045,000.00			12	136,547,250.00
2	15	02	2	06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada Jaringan Jalan Kota dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	77	3,604,972,906.00			77	3,785,221,551.30

2	15	02	2	06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	21	2,566,348,656.00		12	2,694,666,088.80
2	15	02	2	06	0013	Pembanguna Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4	201,050,000.00		9	211,102,500.00
2	15	02	2	06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	19,740,000.00		10	20,727,000.00
2	15	02	2	06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	6	4,725,000.00		6	4,961,250.00
2	15	02	2	06	0016	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	6	813,109,250.00		12	853,764,712.50
2	15	02	2	06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9			9	-
2	15	02	2	07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota yang disetujui	100	39,987,000.00		100	41,986,350.00
2	15	02	2	07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi	25	39,987,000.00		25	41,986,350.00
2	15	02	2	09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Angkutan Umum yang tersedia	14.88	46,930,000.00		14.88	49,276,500.00
2	15	02	2	09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	6	46,930,000.00		10	49,276,500.00

2	15	02	2	11		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan		11	4,655,000.00			11	4,887,750.00
2	15	02	2	11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2	4,655,000.00			1	4,887,750.00
2	15	02	2	14		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Izin Trayek Angkutan Orang lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		14	87,500,000.00			14	91,875,000.00
2	15	02	2	14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		3	48,650,000.00			12	51,082,500.00
2	15	02	2	14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		6	38,850,000.00			12	40,792,500.00
							Jumlah			44,111,165,797.00	-	-		46,316,724,086.85

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, maka dibutuhkan dana sebesar **Rp. 44,111,165,797.00,-** (***Empat puluh empat milyar seratus sebelas juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah***). Dari Rencana Total Anggaran tersebut, sumber dana yang dibutuhkan dari APBD.

**Tabel T-C.33**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026  
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Probolinggo  
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan**

Lembar..... Dari.....

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Tahun 2026	tahun 2026	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6.00	7	8	9	10
2	15	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%</b>	Kota Probolinggo	87	11,610,138,991.00	DAU		89	12,190,645,940.55
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%		77	16,905,700.00			79	17,750,985.00
2	15	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	14,105,900.00			6	14,811,195.00
2	15	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7	2,799,800.00			7	2,939,790.00
2	15	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi keuangan sesuai ketentuan</b>		100	8,977,133,799.00			100	9,425,990,488.95
2	15	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		600	8,691,867,591.00			600	9,126,460,970.55

2	15	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		12	281,033,808.00		12	295,085,498.40
2	15	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		7	4,232,400.00		7	4,444,020.00
2	15	01	2	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai ketentuan</b>		100	16,900,000.00		100	17,745,000.00
2	15	01	2	03	0016	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	16,900,000.00		2	17,745,000.00
2	15	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan</b>		100	167,000,000.00		100	175,350,000.00
2	15	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		6	167,000,000.00		6	175,350,000.00
2	15	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>		100	330,908,000.00		100	347,453,400.00
2	15	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	30,757,600.00		5	32,295,480.00
2	15	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		6	27,315,000.00		6	28,680,750.00
2	15	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2	30,389,000.00		2	31,908,450.00

2	15	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2	3,600,000.00		2	3,780,000.00
2	15	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu	12	38,800,000.00		12	40,740,000.00
2	15	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	200,046,400.00		12	210,048,720.00
2	15	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	236,000,000.00		100	247,800,000.00
2	15	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12	236,000,000.00		12	247,800,000.00
2	15	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan ketatalaksanaan yang terpenuhi</b>	100	1,123,187,892.00		100	1,179,347,286.60
2	15	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	3,475,000.00		12	3,648,750.00
2	15	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	242,230,000.00		12	254,341,500.00
2	15	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	31,375,000.00		4	32,943,750.00
2	15	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	846,107,892.00		12	888,413,286.60
2	15	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	100	742,103,600.00		100	779,208,780.00

2	15	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	44,346,000.00		1	46,563,300.00
2	15	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		34	414,407,600.00		34	435,127,980.00
2	15	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		35	23,350,000.00		35	24,517,500.00
2	15	01	2	09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		8	260,000,000.00		8	273,000,000.00
													-
2	15	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase penyediaan fasilitas keselamatan jalan kota</b>		66	32,501,026,806.00		68	34,126,078,146.30
2	15	02	2	01		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan		10	1,054,213,000.00		10	1,106,923,650.00
2	15	02	2	01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		10	1,054,213,000.00		10	1,106,923,650.00
2	15	02	2	02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan</b>		92	26,305,348,900.00		92	27,620,616,345.00
2	15	02	2	02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun		1	100,000,000.00		1	105,000,000.00
2	15	02	2	02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan di Jalan kabupaten/kota yang tersedia		50	6,860,773,872.00		50	7,203,812,565.60
2	15	02	2	02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		12	310,775,000.00		3	326,313,750.00
2	15	02	2	02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		2530	19,033,800,028.00		2530	19,985,490,029.40

2	15	02	2	04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	Persentase Fasilitas Parkir Berizin		95	733,700,000.00			95	770,385,000.00
2	15	02	2	04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		11	733,700,000.00			12	770,385,000.00
2	15	02	2	05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji Berkala		60	623,720,000.00			60	654,906,000.00
2	15	02	2	05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			56,800,000.00				59,640,000.00
2	15	02	2	05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar		9000	62,975,000.00			9000	66,123,750.00
2	15	02	2	05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti lulus Uji pengujian berkala kendaraan bermotor		5840	175,000,000.00			5840	183,750,000.00
2	15	02	2	05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara		9	198,900,000.00			9	208,845,000.00
2	15	02	2	05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor		12	130,045,000.00			12	136,547,250.00
2	15	02	2	06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada Jaringan Jalan Kota dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		77	3,604,972,906.00			77	3,785,221,551.30

2	15	02	2	06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	21	2,566,348,656.00	12	2,694,666,088.80
2	15	02	2	06	0013	Pembanguna Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4	201,050,000.00	9	211,102,500.00
2	15	02	2	06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3	19,740,000.00	10	20,727,000.00
2	15	02	2	06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	6	4,725,000.00	6	4,961,250.00
2	15	02	2	06	0016	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	6	813,109,250.00	12	853,764,712.50
2	15	02	2	06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9		9	-
2	15	02	2	07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota yang disetujui	100	39,987,000.00	100	41,986,350.00
2	15	02	2	07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi	25	39,987,000.00	25	41,986,350.00
2	15	02	2	09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Angkutan Umum yang tersedia	14.88	46,930,000.00	14.88	49,276,500.00
2	15	02	2	09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	6	46,930,000.00	10	49,276,500.00

2	15	02	2	11		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan		11	4,655,000.00			11	4,887,750.00
2	15	02	2	11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2	4,655,000.00			1	4,887,750.00
2	15	02	2	14		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Izin Trayek Angkutan Orang lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		14	87,500,000.00			14	91,875,000.00
2	15	02	2	14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		3	48,650,000.00			12	51,082,500.00
2	15	02	2	14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		6	38,850,000.00			12	40,792,500.00
							Jumlah			44,111,165,797.00	-	-		46,316,724,086.85

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Renja Awal Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2026 ini disusun untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Rancangan Renja Awal Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2026 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi juga dimaksud sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sehingga dapat diharapkan adanya umpan balik guna memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Rancangan Renja Awal Dinas Perhubungan Kota Probolinggo berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas maka Renja berfungsi sebagai perencanaan awal untuk meningkatkan kualitas kinerja yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kota Probolinggo.

Diharapkan dengan dukungan ketersediaan anggaran yang memadai akan dapat mencukupi rencana kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan kedepan, sehingga kinerja Dinas Perhubungan dalam memberikan layanan sektor Perhubungan dapat berjalan dengan maksimal kepada masyarakat.

Probolinggo, 04 Agustus 2025  
DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PROBOLINGGO



**Dr. ACUS EFENDI S.Sos., M.Si.**  
197309091992011001